

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang memegang peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu fondasi utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM menjelaskan bahwa UMKM memberikan kontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam penelitian ini, produk domestik bruto menggambarkan jumlah total pendapatan dan pengeluaran nasional atas barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara (Batubara et al., 2023). Hal ini berarti bahwa UMKM di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk berkembang dan memperkuat perannya dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, keberadaan UMKM di Indonesia menjadi fokus dan perhatian bagi pemerintah karena kontribusinya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suindari & Juniariani, 2020).

Kabupaten Sleman yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan UMKM yang pesat. Setiap tahunnya, jumlah UMKM di Kabupaten Sleman terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini mencerminkan dinamika ekonomi yang semakin baik. Berikut ini disajikan data mengenai jumlah UMKM di Kabupaten Sleman, yang menunjukkan tren pertumbuhan dari waktu ke waktu:

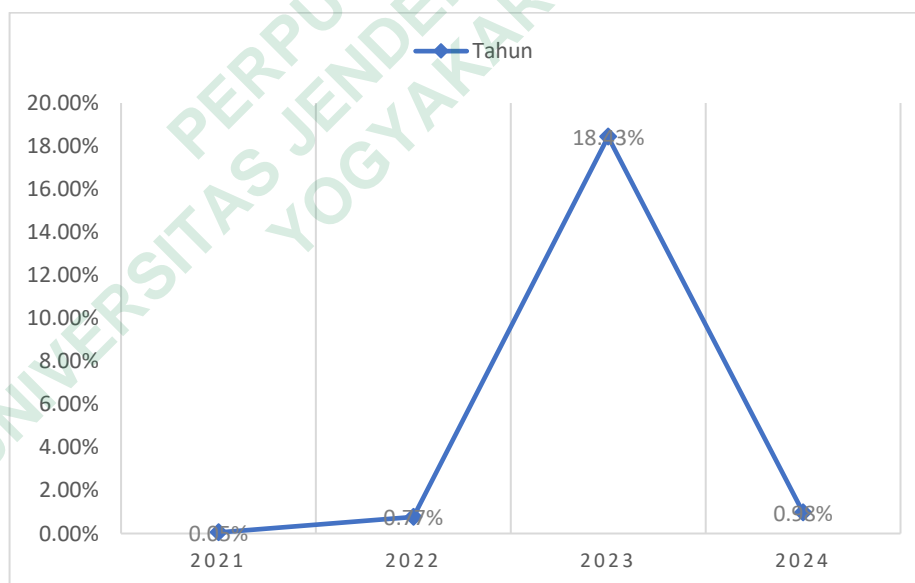
**Tabel 1. 1 Jumlah UMKM di Sleman Periode Tahun 2020 – 2024**

| No.           | Klasifikasi    | Tahun         |               |               |                |                |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|               |                | 2020          | 2021          | 2022          | 2023           | 2024           |
| 1.            | Usaha Mikro    | 51.668        | 90.148        | 90.535        | 109.757        | 109.961        |
| 2.            | Usaha Kecil    | 954           | 19            | 19            | 168            | 170            |
| 3.            | Usaha Menengah | 49            | 3             | 3             | 11             | 11             |
| <b>JUMLAH</b> |                | <b>52.671</b> | <b>90.170</b> | <b>90.557</b> | <b>109.757</b> | <b>110.142</b> |

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, tahun 2025

Data tersebut dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman yang menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Sleman mengalami tren peningkatan setiap tahunnya, yang mengindikasikan peran strategis UMKM dalam menggerakkan perekonomian, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dinas Koperasi dan UKM Sleman, 2024). Namun demikian, kinerja UMKM tidak hanya diukur dari pertumbuhan jumlah usaha, tetapi juga melalui peningkatan omzet UMKM. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Sleman tahun 2024, selama tahun 2021 hingga 2024 data capaian kinerja omzet pelaku UMKM Kabupaten Sleman menunjukkan pola pertumbuhan yang sangat fluktuatif. Hal tersebut tercermin dari grafik di bawah ini yang menunjukkan tren fluktuatif, sehingga mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja belum tercapai secara konsisten dan berkelanjutan.

Gambar 1. 1 Presentase Capaian Kinerja Omzet Pelaku UMKM di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024



Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 2024

Berdasarkan gambar grafik di atas, terlihat bahwa capaian kinerja omzet pelaku UMKM di Kabupaten Sleman selama periode 2021 hingga 2024 mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2021, capaian omzet tercatat hanya sebesar 0,05%, kemudian meningkat menjadi 0,77% pada tahun 2022. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian tertinggi

mencapai 18,43%, namun capaian ini tidak dapat dipertahankan karena tahun 2024 kembali menurun drastis menjadi 0,98%. Hal ini ini mencerminkan bahwa meskipun jumlah UMKM di Sleman terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, hal tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kinerja usaha secara konsisten, khususnya dalam hal omzet usaha.

Pelaku UMKM di Kabupaten Sleman menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada kinerja usaha mereka. Berdasarkan analisis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Sleman 2024, kendala-kendala tersebut mencakup lemahnya pencatatan dan pengelolaan keuangan, keterbatasan akses permodalan dan kesadaran terhadap pentingnya legalitas usaha, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital (Dinas Koperasi dan UKM Sleman, 2024). Kondisi tersebut menguatkan temuan dari studi yang dilakukan oleh Rumini et al. (2020), yang menyebutkan bahwa banyak UMKM belum siap menghadapi persaingan karena masih mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan, permodalan, dan pemanfaatan teknologi dalam proses bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UMKM akan berisiko menurun apabila isu tersebut tidak segera ditangani.

Aspek keuangan menjadi elemen penting dalam menilai kondisi keuangan suatu usaha secara keseluruhan, karena mencerminkan kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan dan mempertahankan keberlangsungan usahanya (Siswanti, 2020). Hal ini dapat dikatakan bahwa aspek keuangan menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja suatu entitas bisnis, termasuk UMKM. Akan tetapi, berdasarkan LKjIP Kabupaten Sleman tahun 2024, sebagian pelaku UMKM di Kabupaten Sleman belum memiliki perencanaan keuangan yang terstruktur dan legalitas usaha yang masih diabaikan. Rendahnya pemahaman dalam menyusun rencana bisnis yang terstruktur dan legalitas usaha yang belum terpenuhi juga menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan kapasitas usaha mereka. Selain itu, lemahnya pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan usaha juga menjadi penghambat bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman (Dinas Koperasi dan UKM Sleman, 2024). Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa kelemahan

dalam aspek keuangan dapat secara langsung memengaruhi kinerja UMKM. Studi oleh Farhan et al. (2023) mendukung pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa aspek keuangan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM. Sebaliknya, hasil penelitian dari Bani et al. (2024) menyimpulkan bahwa aspek keuangan tidak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja UMKM. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2021) mengungkapkan bahwa aspek keuangan justru berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja UMKM. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa peran aspek keuangan terhadap kinerja UMKM bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh kesiapan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya keuangannya secara efektif.

Keterbatasan akses terhadap sumber permodalan ini masih sering dialami oleh beberapa pelaku UMKM, dan kondisi ini turut berkontribusi pada menurunnya kinerja usaha mereka (Yanti, 2019). Banyak dari pelaku UMKM kesulitan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan formal, seperti jaminan aset, kelengkapan dokumen, atau legalitas usaha yang sah. Rendahnya literasi keuangan juga membuat pelaku UMKM belum memahami prosedur, risiko, dan manfaat dari berbagai jenis pembiayaan yang tersedia. Hal ini menunjukkan inklusi keuangan memegang peranan penting sebagai jembatan untuk memperluas dan mempermudah akses terhadap layanan keuangan secara merata, sehingga dapat membantu UMKM memperoleh dukungan finansial yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya.

Pemanfaatan layanan keuangan formal oleh UMKM di Sleman masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan potensi yang sebenarnya dimiliki (Dinas Koperasi dan UKM Sleman, 2024). Kondisi tersebut menandakan bahwa tingkat inklusi keuangan di Kabupaten Sleman belum mencapai level yang ideal, terutama dalam hal pemanfaatan layanan keuangan digital dan akses pembiayaan yang fleksibel dan adaptif. Inklusi keuangan dapat diartikan sebagai kondisi masyarakat termasuk pelaku UMKM memiliki akses yang memadai terhadap berbagai layanan keuangan

formal yang berkualitas, aman, terjangkau, serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka (OJK, 2017). Namun, akses yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM di Sleman. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan, keterbatasan pemahaman terhadap produk keuangan digital, dan masih minimnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal. Akibatnya, pelaku UMKM di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya mampu memanfaatkan layanan keuangan untuk memperluas skala usaha dan meningkatkan daya saing.

Hasil penelitian menegaskan bahwa inklusi keuangan memainkan peran krusial dalam meningkatkan kinerja UMKM. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2019), Joko et al. (2022), dan Hapsari (2023) menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan yang tinggi berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Berbeda dengan temuan Rani & Desiyanti (2024) yang menyebutkan bahwa inklusi keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM. Sementara itu, Anggraini et al. (2023) justru mengemukakan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja UMKM, yang disebabkan oleh kurangnya literasi keuangan yang membuat pelaku usaha tidak mampu mengelola akses keuangan secara optimal. Perbedaan hasil temuan ini mengindikasikan bahwa tanpa diiringi peningkatan literasi keuangan dan kesiapan pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan keuangan secara bijak, inklusi keuangan belum tentu menghasilkan dampak positif.

Pengembangan teknologi digital telah menjadi strategi yang penting dalam mendorong perluasan inklusi keuangan, terutama dalam menyediakan alternatif akses pembiayaan yang lebih fleksibel dan adaptif bagi pelaku UMKM (Safrianti et al., 2022). Salah satu bentuk inovasi digital yang berkembang pesat adalah *financial technology peer-to-peer lending* yaitu layanan pinjam meminjam secara *online* yang mempertemukan langsung pemberi dana dengan penerima pinjaman tanpa melalui lembaga keuangan konvensional. Layanan ini menawarkan proses pengajuan yang lebih mudah, cepat, dan persyaratan yang relatif ringan, sehingga menjadi solusi potensial

atas kendala akses pembiayaan yang kerap dihadapi UMKM (Syarifah & Hasna, 2019). Namun, di Kabupaten Sleman pemanfaatan layanan *fintech* P2P *lending* belum berjalan secara optimal. Banyak pelaku UMKM Sleman masih menghadapi kendala dalam mengakses layanan ini, terutama terkait literasi digital dan kepercayaan terhadap platform *fintech* (Dinas Koperasi dan UKM Sleman, 2024). Hal ini diperkuat oleh data Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan layanan *fintech* P2P *lending* oleh UMKM di wilayah Sleman masih berada di bawah 30% dari total populasi UMKM, sehingga mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi teknologi finansial dan tingkat adopsi di tingkat pelaku usaha ((Otoritas Jasa Keuangan, 2023)).

Kehadiran *fintech* P2P *lending* memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan, melalui layanan *fintech* masyarakat terutama para pelaku bisnis sektor UMKM dapat lebih mudah mengakses alternatif layanan keuangan yang mereka butuhkan (Hidayat et al., 2021). Pernyataan tersebut memperkuat hasil temuan dari Hamidah et al. (2020), Safrianti et al. (2022), dan Hapsari (2023) yang menyatakan bahwa *fintech* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, baik dari sisi efisiensi operasional maupun perluasan akses pembiayaan. Berbeda dengan temuan yang diperoleh Saputra et al. (2022) yang menyebutkan bahwa keberadaan *fintech* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM. Sementara itu, Hidayatullah & Sartika (2024) justru mengemukakan bahwa *fintech* P2P *lending* memberi dampak negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja UMKM, karena kurangnya sosialisasi layanan *fintech* P2P *lending* kepada pelaku UMKM.

Kinerja usaha menjadi indikator utama dalam menilai tingkat keberhasilan suatu entitas bisnis, yang mencerminkan sejauh mana capaian kerja terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks UMKM di Kabupaten Sleman, keberlanjutan dan peningkatan kinerja menjadi suatu harapan sekaligus kebutuhan untuk menjaga eksistensi usaha di tengah persaingan yang semakin kompetitif. Pencapaian kinerja usaha yang maksimal

memerlukan peningkatan modal serta peningkatan penggunaan teknologi informasi. Kinerja usaha yang baik tidak hanya berdampak positif terhadap reputasi dan kepercayaan pelanggan, tetapi juga menjadi faktor penting bagi UMKM dalam mempertahankan posisi mereka di pasar serta memperluas jangkauan bisnis (Purwati, 2024).

Persaingan yang semakin ketat serta pesatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia menuntut para pelaku usaha untuk mampu mempertahankan eksistensi sekaligus bersaing dengan pelaku UMKM lainnya. Kondisi ini mendorong UMKM untuk menciptakan inovasi usaha yang unik, tentunya dengan kinerja yang baik. Kenyataannya banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi keterbatasan wawasan dan pengetahuan, sehingga kurang memiliki orientasi jangka panjang dalam menjalankan usahanya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja usahanya cenderung bersifat konvensional disebabkan karena kurangnya pengetahuan dalam bidang manajemen. Kesalahan dalam mengukur produktivitas usaha masih sering terjadi, sehingga berdampak pada ketidakakuratan dalam menilai kinerja usaha secara keseluruhan.

Penelitian ini memanfaatkan teori *Resouce Based View* (RBV) karena relevan dalam menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya internal seperti modal dan kemampuan manajerial sebagai fondasi keunggulan bersaing. Teori RBV telah digunakan oleh Pereira & Rini (2022), yang menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya internal secara optimal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Selain itu, teori *Technology Acceptance Model* (TAM) digunakan untuk mendukung analisis terhadap penerimaan pelaku UMKM terhadap teknologi, khususnya *fintech* P2P *lending*, sebagai salah satu bentuk inovasi digital yang dapat menunjang efisiensi dan daya saing usaha. Penelitian oleh Hapsari (2023) menunjukkan bahwa persepsi terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan *fintech* sangat memengaruhi tingkat adopsi teknologi tersebut, yang pada akhirnya berdampak

pada efisiensi dan daya saing usaha.

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kabupaten Sleman, ditambah dengan adanya *research gap* pada studi-studi terdahulu, penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting karena bertujuan untuk menguji pengaruh aspek keuangan, inklusi keuangan, dan *Fintech P2P lending* terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Sleman.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dirancang untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu utama dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Aspek Keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Sleman?
2. Apakah Inklusi Keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Sleman?
3. Apakah *Financial Technology Peer-to-Peer (P2P) Lending* berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Sleman?
4. Apakah Aspek keuangan, Inklusi Keuangan, dan *Financial Technology Peer-to-Peer (P2P) Lending* berpengaruh positif secara simultan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Sleman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh aspek keuangan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Sleman.
3. Mengetahui pengaruh *Financial Technology Peer-to-Peer (P2P) Lending* terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Sleman.

4. Mengetahui pengaruh aspek keuangan, inklusi keuangan, dan *Financial Technology Peer-to-Peer (P2P) Lending* terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Sleman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja UMKM, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang berguna bagi pelaku UMKM, pembaca, akademisi, maupun pemangku kepentingan dalam memahami dan mendukung peningkatan kinerja UMKM melalui aspek keuangan, inklusi keuangan, dan pemanfaatan *fintech P2P lending*.

##### **3. Secara kebijakan**

###### **a) Bagi pelaku UMKM**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan faktor-faktor internal yang berkontribusi terhadap kinerja usaha, sehingga berdampak pada pertumbuhan konsumen dan keuntungan.

###### **b) Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif untuk mendorong kinerja UMKM, serta menjadi dasar evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan.

### **E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka penelitian ini akan dibatasi pada UMKM yang terdaftar secara resmi di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman. Fokus penelitian mencakup variabel aspek keuangan, inklusi keuangan, *financial technology peer-to-peer (P2P) lending*, kinerja UMKM. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada informasi dan kondisi selama tahun 2024.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA